

Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden 2024

Risky Aris Nanda S¹ Sri Erlinda² Indra Primahardani³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}
Email: risky.aris1062@student.unri.ac.id¹ sri.erlinda@lecturer.unri.ac.id²
indra.primahardani@lecturer.unri.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 yang berisikan tentang metode sosialisasi dalam pemilihan umum yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum, baik tingkat pusat maupun daerah. Tentunya dari peraturan KPU ini bisa menjadi pedoman oleh KPU dalam menerapkan strategi atau cara bagaimana mempengaruhi pemilih pemula untuk ikut lebih aktif dalam berpartisipasi pada pemilihan Presiden 2024. Metode Penelitian ini adalah kualitatif, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi yang digunakan KPU Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan presiden 2024 Penelitian ini dilaksanakan di Kantor KPU Pekanbaru. Untuk menentukan informan Metode penentuan sampel yang di gunakan adalah metode Snowball sampling. Pada Penelitian ini, Peneliti mendapatkan 9 Narasumber diantaranya 2 orang KPU, 5 Orang PPK, dan 2 orang dari guru kesiswaan sekolah yang berbeda. Berdasarkan hasil peneltian bersama 9 narasumber, terdapat 4 strategi yang dijalankan oleh KPU Pekanbaru dalam mensosialisasikan pemilu 2024 di antaranya, strategi komunikasi tatap muka, strategi komunikasi media massa, strategi komunikasi alat peraga, dan strategi komunikasi media kreasi. Adapun strategi yang tidak di jalankan adala strategi menggunakan relawan demokrasi.

Kata Kunci: Strategi komunikasi, KPU, Pemilih Pemula, Pemilihan Presiden



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi, legalitas dan legitimasi pemerintahan adalah faktor yang sangat penting karena pemerintah dibentuk melalui konstitusi dan pemerintah harus memiliki legitimasi untuk bisa dipercaya karena pemerintah yang demokratis merupakan pemerintahan yang dilakukan melalui hasil pemilihan umum. Dalam negara demokrasi pemilihan umum adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi karena pemilihan umum bagian dari kedaulatan rakyat. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan ekspresi dari keterlibatan rakyat dalam pemerintahan demokratis. Dalam konteks sistem politik demokratis, pelaksanaan pemilihan umum menjadi tanggung jawab lembaga negara, yang dikenal sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat provinsi maupun daerah. Untuk menjalankan pemilihan umum dengan prinsip-prinsip demokratis, penyelenggara pemilu mengacu pada pedoman berikut: independen, transparan, adil, legalitas yang pasti, tertib administratif, berorientasi pada kepentingan umum, terbuka, profesional, akuntabel, efisien, dan efektif. Mewujudkan negara demokratis merupakan tujuan utama yang dikejar oleh Indonesia. Miriam Budiharjo(2020) memberikan pengertian keterlibatan politik diartikan sebagai keterlibatan individu atau organisasi dalam proses politik baik pada tingkat individu maupun kelompok. Dengan cara aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik, seperti memilih pemimpin atau elit politik dalam pemilihan umum, serta melakukan upaya langsung atau tidak langsung untuk memengaruhi keputusan politik yang

berdampak pada kepentingan masyarakat. Secara langsung mengambil bagian dalam pemilihan kepala negara dan daerah membawa dampak positif bagi suatu negara untuk terlibat dalam tingkat partisipasi politik yang tinggi. Terlibat dalam proses ini melibatkan lebih dari sekadar menggunakan hak pilih mereka yang paling penting adalah cara mereka secara rasional memanfaatkan hak pilih tersebut untuk memberikan kontribusi terbaik bagi negara. Remaja dan pelajar merupakan komunitas yang cukup besar dan sangat terlibat dalam setiap pemilu. Pemilih pemula, yang berada dalam rentang usia 17 hingga 22 tahun, berhak memilih. Kategori ini mencakup pelajar, pekerja muda, dan mereka yang sudah menikah namun belum berusia 17 tahun.

Di tingkat sekolah menengah atas (SMA), pemilih baru tentu saja merupakan kategori tersendiri yang seringkali mengejutkan dan tentu saja menjanjikan jika dilihat dari jumlahnya. Kehadiran mereka dianggap unik karena mereka memilih dengan antusiasme tinggi, meskipun keputusan mereka belum sepenuhnya bulat. Sebenarnya mungkin untuk menganggap pemilih pemula sebagai pemilih tetap (swing voter) yang sebenarnya. Mereka mengambil keputusan politik lebih berdasarkan pada lingkungan politik lokal dibandingkan pertimbangan ideologis tertentu. Kepentingan tertentu dari orang-orang terdekatnya, seperti orang tua atau saudara, cenderung mempengaruhi pemilih pemula. Saat ini, sosialisasi pemilihan umum sangat penting untuk pemilih pemula, mengingat perlunya transfer pengetahuan politik. Hal ini memerlukan kesadaran yang lebih dalam mengenai pentingnya pemilu bagi negara dan negara bagian, serta mengetahui berbagai aspek pemilu, seperti prosedur, tahapan, dan lembaga yang terlibat. Oleh karena itu, tujuan dari materi penjangkauan pemilu dalam pendidikan pemilih haruslah untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan secara umum. Pada Pemilu 2014, KPU Kota Pekanbaru berfokus pada pengenalan target-targetnya dengan mengarahkan perhatian pada penyuluhan Pemilu 2014 kepada semua pemilih yang terdaftar di Kota Pekanbaru. Sasaran tersebut dipecah menjadi lima kelompok pemilih strategis: kelompok pinggiran, kelompok perempuan, kelompok agama, penyandang disabilitas, dan pemilih pemula. Pemilihan media komunikasi merupakan alat penting dalam penyampaian pesan dalam penerapan strategi komunikasi. Media yang digunakan untuk komunikasi dipilih dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, pesan yang ingin disampaikan, dan metode yang akan digunakan.

Tujuan dari penggunaan strategi komunikasi tentu akan dipengaruhi oleh pemilihan media yang sesuai. Penulis mengidentifikasi beberapa media yang sangat bermanfaat dalam mengedukasi masyarakat mengenai Pemilu 2014, menggunakan media kelompok, mengadakan pembicaraan atau seminar di perguruan tinggi dan sekolah menengah, dan yang paling penting, menyelenggarakan Hubungan Pemilu (Relawan Demokrasi Pemilu). Hasilnya, KPU Kota Pekanbaru akan lebih mudah berbicara dengan khalayak secara langsung berdasarkan kelompok atau segmen. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru berupaya menyebarkan pesan-pesan yang meyakinkan, instruktif, dan mencerahkan ketika melakukan inisiatif sosialisasi. Dengan menggunakan strategi komunikasi persuasif diharapkan sasaran komunikasi dapat terinspirasi untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2014. Berbeda dengan pemilu tahun 2019 yang banyak menyita perhatian dan cukup menarik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan partisipasi pemilih dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu tahun 2019 adalah 199.987.870, dengan 158.012.506 pemilih yang menggunakan hak suaranya (hak pilih). Ini adalah peningkatan dari pemilu tahun 2018. Menurut Farisa (2019), tingkat partisipasi pemilih mencapai 81%, jauh di atas target nasional 77,5%.

Ternyata peningkatan partisipasi pemilih tidak hanya terlihat di tingkat nasional tetapi juga di daerah-daerah Indonesia. Ini terbukti di Provinsi Riau, di mana partisipasi pemilih

mencakup hampir seluruh kabupaten dan kota di seluruh provinsi. Untuk wilayah Provinsi Riau, partisipasi pemilih mencapai 78%, melampaui target 75% yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Riau. Dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 sebesar 62,73%, jumlah ini merupakan peningkatan yang signifikan. Bahkan, sejumlah kabupaten dan kota telah mencapai tingkat partisipasi pemilih hingga 80%, berdasarkan data yang dihimpun KPU Provinsi Riau. Sangat penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menerapkan strategi komunikasi dalam proses sosialisasi pada masyarakat, terutama dikalangan milenial. Selain itu, KPU harus memahami keinginan kelompok. Materi dalam sosialisasi dapat mengedukasi masyarakat tentang politik dan membantu pemilih baru menjadi lebih terdidik secara politik. Faktor utama yang meningkatkan keterlibatan politik pada periode pemilu mendatang adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu, KPU bertugas meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu dengan menjangkau berbagai strata dan kelompok pemilih pemula untuk menurunkan persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Pada tahun 2019 yang lalu, KPU menerapkan empat strategi komunikasi kepada masyarakat pada pemilihan serentak 2019, sebagaimana yang diatur oleh Keputusan KPU Nomor 10 tahun 2018 pasal 11 sampai dengan pasal 14. Strategi pertama adalah penyebaran informasi melalui ceramah atau interaksi tatap muka; kedua adalah media massa, baik cetak maupun elektronik; ketiga adalah penggunaan bahan dan alat sosialisasi; keempat, penggunaan media dalam pembuatan mural; dan yang kelima adalah keterlibatan relawan demokrasi. Dengan keberadaan kelima strategi komunikasi tersebut, penulis tertarik untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana KPU Pekanbaru mengimplementasikan strategi komunikasi khusus untuk Pemilih Pemula. Sehingga, penulis ingin mengetahui taktik komunikasi seperti apa yang akan digunakan KPU Kota Pekanbaru untuk mendorong pemilih pemula untuk mencoblos pada tahun 2024 setelah mengamati peristiwa di atas. Maka penulis memberikan judul penelitiannya, yaitu Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemula Pada Pemilihan Presiden 2024. Dari latar belakang masalah di atas peneliti memiliki rumusan masalah untuk di teliti, adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Partisipasi Politik Pemula Pemula Pada Pemilihan Presiden 2024?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden 2024.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan metode yang dipilih oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis data penelitian, termasuk dalam studi tentang Strategi Komunikasi KPU Kota Pekanbaru untuk meningkatkan partisipasi politik pemula pada Pilpres 2024, penulis yakin bahwa pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan data kualitatif akan memberikan hasil yang akurat dan relevan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor KPU Pekanbaru. Untuk menentukan informan Metode yang di gunakan adalah metode Snowball sampling. Pada Penelitian ini, Peneliti mendapatkan 9 Narasumber diantaranya 2 orang KPU, 5 Orang PPK, dan 2 orang dari guru kesiswaan sekolah yang berbeda. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara sebanyak 40 pertanyaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah peneliti melakukan wawancara ke 9 narasumber maka terdapat 4 strategi komunikasi yang dijalankan oleh KPU Pekanbaru diantaranya : strategi tatap muka ,strategi komunikasi melalui media massa. Strategi komunikasi melalui alat peraga, dan startegi komunikasi melalui media kreasi.Sementara strategi yang tidak dijalankan adalah strategi komunikasi melalui relawan demokrasi.

1. Strategi Komunikasi Melalui Tatap Muka. Berdasarkan dari wawancara kepada Komisioner KPU, kepada Kasubag Teknis dan Hubmas KPU, kepada Perwakilan PPK yang ada di Pekanbaru dan kepada Pihak beberapa Sekolah di Pekanbaru dapat dikatakan bahwa strategi melalui tatap muka terlaksana dengan baik. dengan dilaksanakan berbagai macam yang dilakukan seperti adanya seminar atau penyuluhan untuk pemilih pemula,diskusi,simulasi, pelaksanaan tersebut dilakukan beberapa titik sekolah. KPU Kota Pekanbaru dibantu oleh PPK dalam mensosialisasikan Pemilu 2024 Kepada Pemilih Pemula, di mana PPK berperan sebagai perpanjangan tangan KPU dalam upaya tersebut.Hal ini sudah tercantum dalam peraturan KPU mengenai tugas PPK Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 yang mana salah satu tugas PPK itu adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang berakitan dengan tugas dan wewenang PPK di masyarakat.



Gambar 1. Tatap Muka di Pesantren Babussalam

Dalam melaksanakan Strategi Komunikasi tatap muka, KPU memberikan beberapa materi yang di sampaikan ke pemilih pemula di antara nya materi demokrasi, Pemilu, menjadi pemilih yang cerdas, tata cara pemungutan suara dan materi-materi yang berhubungan dengan pemilu lainnya.Hal ini sangat penting di ajarkan ke pemilih pemula di karenakan selain untuk mengedukasikan tentang penyelenggaraan pesta demokrasi,hal ini juga dapat mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan generasi muda sehingga nantinya peserta dapat memiliki pemahaman yang mendalam terkait pemilihan suara tanpa ada kepentingan peroarangan atau kelompok.Pernyataan ini juga sesuai apa yang dikatakan oleh Rusadi Kantaprawira (2011) yang mana beliau berpendapat bahwa pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.Selain materi yang disebutkan tadi,KPU juga memberikan materi tata cara memilih yang benar.Hal ini sangat penting, dikarenakan masih banyaknya pemilih pemula yang salah dalam melakukan pencoblosan. Sehingga menyebabkan surat suara menjadi tidak sah.Ini juga sangat penting di ajarkan oleh pihak penyelenggara, agar suara tidak terbuang begitu saja.

KPU setelah menyampaikan materi, membuka sesi diskusi tanya jawab. Hal ini bertujuan untuk memperdalam lagi pengetahuan dari pemilih pemula. Hal ini sesuai dengan pendapat Nana Sudjana (2014) yang mana dengan adanya diskusi informasi yang di berikan lebih jelas dan lebih teliti tentang suatu persoalan. Selanjutnya, sebelum selesainya diskusi KPU akan memberikan beberapa kuis kepada pemilih pemula, Hal ini juga bertujuan untuk melihat pemahaman pemilih pemula selama mendengarkan informasi yang diberikan oleh KPU. Dan bagi yang bisa menjawab KPU akan memberikan beberapa dorprize ke siswa tersebut. Dalam pelaksanaan tatap muka yang di jalankan oleh KPU kepada pemilih pemula, KPU tidak memiliki kendala selama menjalankan proses tatap muka tersebut. Namun ada beberapa evaluasi yang disampaikan oleh Narasumber kepada peneliti untuk pemilu selanjutnya yaitu sebagai berikut:

- a. Selama menjalankan proses tatap muka kemarin, KPU Kota Pekanbaru tidak memasifkan menyampaikan informasi tentang syarat pindah memilih untuk pemilih pemula yang berasal dari luar Pekanbaru. jadi untuk pemilu yang akan datang, KPU harus memasifkan lagi menyampaikan informasi ini kepada pemilih pemula terkhusus pemilih pemula dari luar pekanbaru.
- b. KPU juga tidak menyampaikan peta lokasi pindah memilih selama sosialisasi kemarin, Hal ini mengakibatkan surat suara menjadi menumpuk di satu titik lokasi pemilihan. oleh karena itu ini harus disampaikan lagi di sosialisasi pemilu selanjutnya.
- c. Untuk menjalankan sosialisasi pemilu selanjutnya, KPU harus bisa membuat metode sosialisasi tatap muka yang lebih variatif dan kreatif lagi. Hal ini agar siswa-siswa tidak mudah bosan selama mengikuti sosialisai pemilu.

2. Strategi Komunikasi Melalui Media Massa. Media massa memiliki kekuatan yang sangat signifikan dalam komunikasi politik untuk mempengaruhi khalayak. Terlebih lagi media massa pada tingkat nasional atau lokal yang biasanya menjadi rujukan publik dalam berperilaku politik. Hal ini juga disampaikan oleh Dan Nimmo (2015) yang mana beliau mengatakan bahwa media berfungsi sebagai pelipatganda pesan yang berkaitan dengan saluran lainnya. Berdasarkan dari wawancara kepada Komisioner KPU, kepada PPK yang ada di Pekanbaru dan kepada guru sekolah dapat dikatakan bahwa sosialisasi melalui media massa terlaksana seperti media online, radio dan koran itu terlaksana. Namun diantara beberapa jenis media tersebut, KPU Kota Pekanbaru lebih dominan menggunakan media sendiri.



Gambar 2. Media Massa Cetak Buku

Dari pelaksanaan nya, KPU kota pekanbaru menjalankan strategi media massa dengan mengajak siswa-siswa mengikuti akun media online KPU Kota Pekanbaru. Dari media, KPU memberikan berbagai macam informasi mengenai pemilu. KPU bersama tim media akan selalu mengupload berita tentang pemilu. Adapun media massa online yang

dimiliki KPU Kota Pekanbaru diantaranya, Instagram, Facebook, Tiktok, website, Youtube. Dengan adanya media massa maka informasi akan lebih mudah disebarluaskan. Tetapi KPU Kota Pekanbaru perlu lebih intens bekerjasama dengan pihak media untuk menyebarkan informasi seputar sosialisasi. Menurut Nurjadin dkk (2017), Pelaksanaan sosialisasi melalui media massa dilakukan dengan cara menggaet dan mengajak media yang ada di Pekanbaru untuk menyebarkan informasi terkait seputar sosialisasi seperti tahapan yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru. Media massa memiliki peranan yang sangat penting karena media massa sebagai alat untuk menyebarkan informasi. Menurut Semi dkk (2021), Peran media massa sangat penting karena media merupakan alat untuk menyebarkan dalam hal informasi baik itu media baru atau media online dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat secara online maupun secara manual.

Hal ini senada juga bahwa peran media memberikan informasi kepada masyarakat. menurut Munzir (2019) peran media sosial memiliki beraneka ragam seperti untuk mendapatkan atensi masyarakat lewat kampanye, membantu generasi muda untuk sadar politik, dan meningkatkan partisipasi politik kepada pemilih pemula. Untuk penggunaan media sosial diperlukan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih dalam politik. Menurut Adriani (2020) pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial digunakan untuk mendongkrak kesadaran masyarakat agar partisipasi pemilih naik melalui pendekatan online. Pendekatan online tersebut dilakukan melalui salah satunya adalah melalui twitter, instagram, dan facebook (@kpu_pekanbaru). Selanjutnya, KPU Kota Pekanbaru memberikan evaluasi terkait strategi media massa untuk pemilu selanjutnya. adapun evaluasi yang narasumber sampaikan kepada peneliti adalah lebih memperbanyak lagi ide-ide membuat konten menarik dalam penyebaran informasi, baik itu di facebook, instagram, youtube, tiktok dan website. Hal ini bertujuan agar Pemilih pemula tertarik melihat informasi yang diberikan dan meningkatkan motivasi mereka untuk ikut berpartisipasi.

3. Strategi Komunikasi Melalui Alat Peraga. Penggunaan alat peraga kotak suara KPU untuk pemilih pemula merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman pemilih muda. Dengan memahami proses pemilu dan bagaimana menggunakan hak pilih mereka, pemilih pemula akan lebih siap untuk berpartisipasi dalam pemilu dan menentukan masa depan bangsa. Berdasarkan dari wawancara kepada Komisioner KPU, kepada PPK dan kepada guru di sekolah dapat dikatakan bahwa sosialisasi melalui alat peraga terlaksana baik. Menurut informan mereka dalam melakukan sosialisasi tatap muka bersamaan dengan membawa alat peraga. Adapun alat peraga yang digunakan KPU dalam melakukan sosialisasi di sekolah merupakan alat peraga pemilu 2019 yang lalu Seperti kotak suara, contoh surat suara, bilik suara, dan beberapa merchandise pemilu. Hal ini bertujuan agar calon pemilih pemula dapat mudah memahami proses pemilu secara langsung.



Gambar 3. Simulasi Alat Peraga di SMAN 7 Pekanbaru

Dalam pelaksanaannya, Setelah penyampaian materi dan diskusi oleh KPU dan siswa, Siswa di arahkan untuk mempraktekkan atau simulasikan kegiatan pemungutan suara. Jadi siswa seolah-olah melaksanakan pemilu secara langsung. Hal ini sangat diperlukan agar siswa sebagai calon pemilih pemula tidak canggung lagi ketika mencoblos di hari pemungutan.

Urgensi Simulasi Pemilihan bagi Pemilih Pemula

1. **Pemahaman Proses Pemilihan:** Simulasi pemilihan memberikan kesempatan bagi pemilih pemula untuk memahami secara praktis proses pemilihan, termasuk prosedur registrasi, penggunaan surat suara, dan tata cara pemungutan suara. Hal ini penting karena pemahaman yang baik tentang proses pemilihan akan membantu mengurangi ketidakpastian dan kecemasan saat berpartisipasi dalam pemilu sesungguhnya.
2. **Meningkatkan Kesadaran Demosi:** Melalui simulasi pemilihan, pemilih pemula dapat memahami pentingnya hak suara mereka dalam demokrasi. Mereka akan menyadari bahwa suara mereka memiliki dampak dan merupakan salah satu cara untuk berkontribusi dalam menentukan masa depan negara.
3. **Mengurangi Ketakutan dan Kecemasan:** Bagi sebagian pemilih pemula, terlibat dalam proses pemilihan dapat menimbulkan ketakutan atau kecemasan, terutama jika mereka tidak familiar dengan prosedur yang harus diikuti. Simulasi pemilihan dapat membantu mengurangi ketakutan ini dengan memberikan pengalaman praktis tanpa tekanan. Adapun yang menjadi evaluasi dari KPU untuk penggunaan alat peraga pada pemilu selanjutnya adalah Tidak tersedianya contoh surat suara yang menggunakan huruf braile khusus pemilih yang tunanetra. Hal ini bisa membuat siswa-siswa difabel khusus yang tunanetra sulit untuk membaca tulisan atau gambar pada surat suara. Harapan dari KPU sendiri ialah untuk sosialisasi pemilu selanjutnya dalam penggunaan alat peraga harus menyediakan contoh surat suara yang menggunakan huruf braile khusus pemilih pemula yang difabel.
4. **Strategi Komunikasi Melalui Media Kreasi.** Dalam Pelaksanaan Strategi komunikasi melalui media kreasi, KPU Pekanbaru menggunakan media kreasi berupa film. Film ini ditayangkan bersamaan dengan strategi tatap muka di sekolah. Adapun film yang ditayangkan adalah film kejarlah janji yang dirilis oleh KPU Republik Indonesia tahun 2023 lalu.



Gambar 4. Film Kejarlah Janji

Film "Kejarlah Janji", yang diproduksi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada tahun 2023, film ini memiliki potensi yang kuat untuk menjadi sarana integrasi bangsa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- a. **Mengangkat Tema Persatuan dan Kesatuan:** Film ini secara jelas mengangkat tema persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini terlihat dari cerita yang menonjolkan

keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia, serta bagaimana perbedaan tersebut dapat disatukan dalam bingkai pemilu yang demokratis.

- b. Menampilkan Nilai-Nilai Kebangsaan: Selain persatuan dan kesatuan, film ini juga menampilkan berbagai nilai-nilai kebangsaan lainnya, seperti toleransi, saling menghormati, dan menjunjung tinggi keadilan. Nilai-nilai ini disampaikan melalui berbagai dialog dan adegan dalam film, sehingga mudah dipahami oleh penonton.
- c. Memperkuat Semangat Nasionalisme: Film "Kejarlah Janji" juga dapat membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan penonton. Hal ini dilakukan melalui penggambaran perjuangan para pahlawan bangsa, serta momen-momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
- d. Media Edukasi Politik yang Efektif: Film ini dikemas dengan cara yang menarik dan menghibur, sehingga dapat menjadi media edukasi politik yang efektif bagi masyarakat, khususnya pemilih muda. Melalui film ini, masyarakat dapat belajar tentang pentingnya pemilu, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis.
- e. Memicu Diskusi dan Refleksi: Film "Kejarlah Janji" tidak hanya memberikan informasi dan edukasi, tetapi juga dapat memicu diskusi dan refleksi di kalangan masyarakat. Hal ini karena film ini mengangkat berbagai isu aktual terkait dengan pemilu dan demokrasi di Indonesia.

4. Strategi Komunikasi melalui Relawan Demokrasi. Pada pelaksanaannya, KPU Pekanbaru pada proses pemilu tahun 2024 tidak menggunakan relawan demokrasi. Hal ini berbeda pada pemilu sebelumnya tahun 2019, yang mana KPU Pekanbaru menggunakan relawan demokrasi. Adapun penyebab tidak terlaksananya strategi komunikasi melalui relawan demokrasi ini adalah terbatasnya anggaran pemilu tahun ini untuk membentuk relawan demokrasi tersebut. Hal ini tentu sangat dibutuhkan oleh KPU Pekanbaru untuk menyadarkan masyarakat terutama kepada pemilih pemula melalui relawan demokrasi tersebut. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat terutama pemilih pemula yang belum sadar akan tanggung jawabnya. Selain itu, masyarakat masih banyak yang menjadi korban hoaks setiap pemilu di adakan, dan hal yang lebih penting lagi masih banyak masyarakat terpengaruhi dari *money politic*. Tentunya ini menjadi pertimbangan bagi KPU Pekanbaru untuk mengatasi itu semua dengan bantuan relawan demokrasi di pemilu selanjutnya. Hal ini dikarenakan karena peran dari relawan demokrasi tersebut sangat dibutuhkan bagi setiap golongan masyarakat untuk menjadikan pemilu yang luber dan jurdil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi komunikasi KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Partisipasi pemilih pemula pada pemilihan presiden 2024 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan strategi komunikasi terealisasi hanya empat strategi yaitu strategi melalui tatap muka dilakukan seperti adanya melakukan sosialisasi ke Sekolah, Adapun bentuk sosialisasinya ialah pemaparan materi, diskusi dan simulasi. selanjutnya strategi melalui media massa seperti media *online* (*Facebook, instagram, Youtube, website, Tiktok*) adapun bentuk pelaksanaannya ialah mengajak pemilih pemula untuk mengikuti akun media milik KPU. Hal ini agar memudahkan pemilih pemula mendapatkan informasi tentang pemilu, ada juga koran dan radio (RRI). ketiga strategi melalui alat peraga sosialisasi seperti adanya contoh kotak suara, bilik suara, surat suara, dan merchandise. Adapun bentuk pelaksanaannya ialah dengan memperagakan alat tersebut saat KPU melakukan sosialisasi tatap muka di sekolah. Dan yang terakhir strategi melalui media kreasi berupa nonton bareng

film "kejarlah janji" Adapun strategi yang tidak terealisasi hanya satu strategi yaitu strategi melalui relawan demokrasi. Adapun yang menjadi alasan tidak terealisasinya strategi ini ialah terbatasnya anggaran untuk mengalokasikan di strategi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andik dan rekan (2017). "Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 1232-1235.
- Asri (2022). "Strategi Komunikasi Organisasi dalam Membangun Semangat Kerja Pegawai Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama RI." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 27(3), 272-275.
- Dewi dan kawan-kawan (2022). "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada Serta Upaya Meminimalisir Golput." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1), 38-39.
- Indarja (2018). "Evolusi Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 1, 63-70.
- Kasuma dan rekan (2022). "Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan pada Program Halte Sampah Di Kelurahan Gunung Bahagia." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 43-44.
- Maria (2020). "Upaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pilkada di Kabupaten Malaka Tahun 2020." *Jurnal Poros Politik*, 23-24.
- Ni Ketut Arniti (2020). "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 333-334.
- Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
<https://www.konsistensi.com/2014/03/mengatasi-angkettidak-valid.html>
- Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kampanye: Peraturan ini mengatur tentang penggunaan alat peraga kampanye, termasuk alat peraga merchandise
- Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemungutan Suara: Peraturan ini mengatur tentang tata cara pencoblosan suara, termasuk untuk pemilih tunanetra
- Rohmah (2019). "Partisipasi Politik Organisasi Massa dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, 3(4), 10-11.